

## Problematika Penerapan Perubahan Kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan

Yasin<sup>1</sup>, Mahmud Darul Kurniyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Article Info

Received: 2 November 2025

Revised: 21 November 2025

Accepted: 25 November  
2025

Online Version: 6 Desember  
2025

### Corresponding Author:

Yasin,

Fakultas Ilmu Pendidikan dan  
Psikologi, Universitas Negeri  
Semarang.

Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec.  
Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa  
Tengah.

Email: [yasinyes51@gmail.com](mailto:yasinyes51@gmail.com)

**Abstract.** The rapid pace of curriculum changes in Indonesia often sparks public cynicism, reflected in the phrase "change the minister, change the curriculum." This study aims to analyze the problematic implementation of curriculum changes, which tend to be generalized without considering the diverse conditions and readiness of each educational unit. It also seeks to provide input to policymakers regarding the potential for injustice that arises when curriculum standardization is not balanced with equitable access, infrastructure, and professional support for teachers across all regions. Furthermore, this study emphasizes the importance of a student-centered approach, namely a curriculum that considers the needs, social context, and realities of students' lives, rather than simply pursuing digitalization targets and administrative indicators. Using a qualitative approach through library research, this study found that the main obstacle to curriculum change lies not in the government's vision for advancing education, but rather in its lack of grounded implementation strategy. The global standards and digitalization promoted are not aligned with the disparities in infrastructure and cultural readiness for learning across regions. When policies are implemented uniformly, the impression of progress appears superficial, but teachers and students actually experience confusion, stress, and unpreparedness. Therefore, this study confirms that the success of the curriculum is highly dependent on the suitability between policies and factual conditions in the field as well as the state's commitment to providing equitable and humane education.

**Keywords:** changes, curriculum, educational units

**Abstrak.** Pergantian kurikulum yang terjadi dalam tempo singkat di Indonesia kerap menimbulkan sinisme publik yang tercermin dalam ungkapan "ganti menteri, ganti kurikulum." Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan perubahan kurikulum yang selama ini cenderung disamaratakan tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi dan kesiapan setiap satuan pendidikan. Penelitian ini juga berupaya memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan mengenai potensi ketidakadilan yang muncul ketika standarisasi kurikulum tidak diimbangi dengan pemerataan akses, infrastruktur, serta dukungan profesional bagi guru di seluruh daerah. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa, yakni kurikulum yang memperhatikan kebutuhan, konteks sosial, serta realitas hidup peserta didik, bukan sekadar mengejar target digitalisasi dan indikator administratif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research), penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam perubahan kurikulum bukan terletak pada visi pemerintah untuk memajukan pendidikan, melainkan pada strategi implementasinya yang kurang membumi. Standar global dan digitalisasi yang dikedepankan tidak selaras dengan ketimpangan infrastruktur dan kesiapan budaya belajar di berbagai wilayah. Ketika kebijakan diterapkan secara seragam, muncul kesan kemajuan di permukaan, namun guru dan siswa justru mengalami kebingungan,

tekanan, dan ketidaksiapan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kesesuaian antara kebijakan dan kondisi faktual di lapangan serta komitmen negara dalam menghadirkan pemerataan pendidikan yang adil dan humanis.

**Keywords:** perubahan, kurikulum, satuan pendidikan

---

Journal Homepage

[ejournal.aripendis.com/edulogia](http://ejournal.aripendis.com/edulogia)

How to cite

Yasin. Kurniyadi, M.D.. (2025). Strategi *The Power of Two* Sebagai Pendekatan Kooperatif Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di MI. *Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxxx/edulogia.vxix.xxxx>

---

## LATAR BELAKANG

Pendidikan pada dasarnya adalah ruang yang terus bergerak, berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Namun, ketika perubahan itu datang terlalu cepat dan bersifat mendasar, sering kali justru menimbulkan keguncangan yang tidak diharapkan. Dalam percaturan global, wacana mengenai kurikulum adaptif memang menjadi isu penting (Fatoni et al., 2024). Akan tetapi, di Indonesia, pergantian kurikulum yang berlangsung dalam tempo singkat kerap menimbulkan sinisme publik yang terwakili dalam ungkapan populer: “ganti menteri, ganti kurikulum.”

Saat ini, tantangan mengemuka pada implementasi kurikulum terbaru yang menuntut tingkat otonomi serta digitalisasi yang tinggi. Kurikulum ini diterapkan secara serentak di tengah kondisi pendidikan nasional yang sangat beragam baik dari segi sumber daya, kultur belajar, maupun kesiapan sekolah. Akibatnya, proses penerapan perubahan kurikulum di tingkat satuan pendidikan menjadi persoalan krusial. Banyak sekolah dipaksa beradaptasi dengan kebijakan yang lahir dari atas tanpa mempertimbangkan kesiapan di akar rumput mulai dari kesenjangan infrastruktur, kesiapan mental dan kompetensi guru, hingga karakter dan budaya belajar siswa.

Berbagai penelitian telah mencoba memotret persoalan ini. Berdasarkan penelusuran literatur melalui Google Scholar, penelitian oleh Suryaman (2020) berjudul “Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar” menyoroti perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut kemandirian, namun belum dibarengi dengan petunjuk teknis yang memadai. Selanjutnya, studi oleh Angga (2022) “Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar” menunjukkan adanya kebingungan administratif yang dialami guru akibat transisi dua kurikulum. Penelitian oleh Rahayu (2022) bertajuk “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak” menemukan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum baru cenderung bias perkotaan dan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan fasilitas sekolah.

Meski memberikan gambaran penting, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan celah. Sebagian besar studi lebih banyak berfokus pada kesiapan guru atau aspek administratif, sementara belum banyak kajian yang secara mendalam mengkritisi paradoks antara tuntutan digitalisasi serta kemandirian siswa dengan realitas ketimpangan infrastruktur dan ketidaksiapan pendukung pendidikan di rumah. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak dapat disamaratakan penerapannya pada seluruh satuan pendidikan karena setiap sekolah memiliki kondisi dan kesiapan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini bermaksud memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan mengenai potensi ketidakadilan yang muncul ketika standardisasi kurikulum tidak diimbangi dengan pemerataan akses dan dukungan yang memadai. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan dan realitas mereka secara nyata dibanding sekadar mengejar target kurikulum yang semakin terdigitalisasi.

---

## METODE PENELITIAN

Untuk mengurai kompleksitas problematika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi serta mensintesis berbagai fenomena, data kebijakan, dan realitas lapangan yang terdokumentasi dalam literatur ilmiah. Proses pengumpulan data tidak dilakukan secara acak, tetapi melalui tahapan metodologis yang ketat guna memperoleh data yang akurat dan valid (Zed, 2014).

Tahap awal penelitian dimulai dengan identifikasi dan perumusan masalah terkait kesenjangan dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, dilakukan penelusuran literatur pada pangkalan data bereputasi seperti Google Scholar dan portal berita pendidikan yang kredibel, menggunakan kata kunci spesifik seperti “problematika kurikulum”, “kesenjangan digital pendidikan”, dan “hambatan implementasi Kurikulum Merdeka”.

Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan seleksi (screening) untuk memilih sumber yang relevan dan terbaru, terutama yang terbit dalam lima tahun terakhir agar dapat menggambarkan kondisi mutakhir pasca-pandemi. Data yang telah tervalidasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) serta interpretasi kritis. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan narasi ideal dalam dokumen kurikulum nasional dengan realitas empiris yang terlihat pada laporan penelitian lapangan.

Seluruh proses tersebut disusun dan disajikan secara deskriptif-analitis yang mengalir, tanpa fragmentasi poin, sehingga menghasilkan argumen yang utuh dan mendalam mengenai ketidaksiapan ekosistem pendidikan dalam menghadapi perubahan kurikulum yang berlangsung secara cepat dan drastis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketimpangan Struktural dalam Penerapan Perubahan Kurikulum**

Penerapan perubahan kurikulum di tingkat satuan pendidikan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural pendidikan Indonesia yang sangat beragam. Ketika judul “Problematika Penerapan Perubahan Kurikulum” dibedah secara mendalam, tampak bahwa persoalannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi terkait erat dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antarwilayah (Abdullah, 2013). Pemerintah sering menetapkan standar kurikulum secara seragam, seolah seluruh daerah memiliki kondisi yang sama, padahal kenyataannya perbedaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia sangat mencolok (Aristiyanto, 2023).

Pemaksaan standarisasi kurikulum pada konteks yang timpang menimbulkan ketidakadilan pendidikan yang serius. Wilayah perkotaan dengan fasilitas lengkap dapat memenuhi tuntutan kurikulum baru, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil harus berjuang keras hanya untuk menjalankan proses pembelajaran dasar. Akibatnya, implementasi kurikulum tampak harmonis di atas kertas, tetapi timpang dan gagal di lapangan (Fatimah et al., 2024).

Kurikulum yang sarat dengan muatan digitalisasi mencerminkan asumsi bahwa semua sekolah memiliki akses teknologi yang memadai. Guru dan siswa dituntut menggunakan platform digital, mengikuti asesmen berbasis komputer, dan memanfaatkan sumber belajar daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah di daerah 3T bahkan belum memiliki jaringan listrik yang stabil, apalagi koneksi internet yang memadai (Kosim, 2007).

Kondisi infrastruktur yang buruk menyebabkan sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menjalankan komponen digitalisasi yang dianggap sebagai indikator kemajuan. Alih-alih memfasilitasi proses pembelajaran, tuntutan digital dalam kurikulum baru justru menjadi beban tambahan bagi sekolah yang minim akses. Hal ini memperlebar jurang antara sekolah maju dan sekolah tertinggal.

Dengan demikian, ketidakmerataan pembangunan dan akses teknologi menjadi akar problematika utama dalam penerapan kurikulum baru. Selama kebijakan pendidikan tidak disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan, perubahan kurikulum hanya akan melahirkan kesenjangan baru yang semakin memperburuk kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

### **Digitalisasi sebagai Beban Baru bagi Daerah Minim Akses**

Digitalisasi yang seharusnya menjadi alat bantu pembelajaran berubah menjadi hambatan ketika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah. Banyak sekolah terpaksa mengejar ketinggalan teknis yang sebenarnya bukan kesalahan mereka, melainkan akibat kurangnya infrastruktur dan dukungan pemerintah. Guru yang tidak terbiasa dengan teknologi dipaksa mengikuti standar digital yang bahkan sulit dicapai oleh sekolah di wilayah perkotaan (Budiman et al., 2023).

Di daerah 3T, tuntutan digitalisasi memperparah tekanan psikologis bagi guru dan siswa. Mereka sering merasa “tertinggal” atau “gagal” dalam menerapkan kurikulum baru, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena sistem menuntut mereka berlari dengan kondisi yang tidak memungkinkan (Halimah, 2019). Ketika akses internet sulit atau tidak ada, pelaksanaan asesmen berbasis komputer menjadi tidak realistis.

Selain itu, digitalisasi yang dipaksakan turut mengancam humanisasi dalam pendidikan. Guru terjebak pada penggunaan aplikasi dan perangkat digital yang rumit, sehingga waktu interaksi langsung dengan siswa berkurang drastis. Padahal, hubungan emosional dan pendampingan personal adalah elemen penting dalam proses pendidikan yang tidak bisa digantikan teknologi (Fatoni & Sukari, 2024).

Akhirnya, digitalisasi dalam kurikulum bukan lagi menjadi jembatan menuju kemajuan, melainkan tembok pembatas yang memisahkan siswa berdasarkan keberuntungan geografis. Tanpa kebijakan afirmatif untuk memperbaiki infrastruktur, digitalisasi hanya mempertegas ketidakadilan pendidikan yang telah lama terjadi.

### **Kerapuhan Konsep Kebebasan Belajar dalam Realitas Sosial**

Salah satu gagasan utama kurikulum baru adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan minat dan bakat sejak dini. Konsep ini tampak ideal ketika dituangkan dalam dokumen kebijakan, tetapi sering kali tidak kompatibel dengan kondisi sosial di banyak daerah (Lestari, 2024). Kebebasan memilih lintasan belajar mengandaikan siswa memiliki kemampuan refleksi diri, dukungan keluarga, serta lingkungan belajar yang kondusif.

Realitasnya, banyak keluarga di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pendidikan dan ekonomi. Orang tua menyerahkan urusan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah, sehingga anak tidak mendapatkan pendampingan yang memadai ketika harus menentukan arah masa depan mereka. Kondisi ini membuat konsep kebebasan belajar terasa seperti beban, bukan kesempatan.

Kurikulum yang memberi keleluasaan pada siswa tanpa disertai fasilitasi yang kuat justru menimbulkan kebingungan. Banyak siswa memilih mata pelajaran bukan berdasarkan minat atau potensi, tetapi berdasarkan kemudahan atau tekanan lingkungan (24/Menkes/2022, 2022). Hal ini sangat kontras dengan harapan kurikulum tentang pembentukan profil pelajar yang mandiri dan berkarakter.

Gagasan kebebasan belajar juga menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator yang memahami karakter setiap siswa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengemban peran tersebut. Keterbatasan jumlah guru, beban administrasi yang tinggi, dan rasio guru-siswa yang besar semakin menyulitkan pelaksanaan konsep ini.

Pada akhirnya, ketidakseimbangan antara idealisasi kurikulum dan realitas sosial menyebabkan implementasi kebebasan belajar berjalan tidak optimal. Tanpa pendampingan keluarga, kesiapan guru, dan dukungan lingkungan, konsep ini hanya akan menjadi slogan yang indah di atas kertas tetapi sulit diwujudkan dalam praktik.

### **Administrasi yang Menggerus Humanisme Pendidikan**

Salah satu problem mendasar dalam implementasi kurikulum baru adalah beban administratif yang berlebihan. Meskipun kurikulum menonjolkan pentingnya pendidikan karakter dan humanisasi proses belajar, tuntutan pelaporan digital yang rumit membuat guru lebih banyak berhadapan dengan aplikasi daripada berinteraksi dengan siswa (Journal et al., 2022). Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan emosional terpaksa habis untuk memenuhi target administratif.

Di banyak sekolah, guru merasa terbebani oleh sistem pelaporan yang tidak hanya rumit, tetapi juga sering berubah. Pergantian platform digital atau pembaruan sistem yang tiba-tiba menyebabkan guru harus terus belajar hal-hal teknis yang tidak selalu relevan dengan proses pembelajaran (Hadiapurwa et al., 2021). Hal ini menimbulkan stres dan menurunkan kualitas pengajaran.

Sementara itu, fokus terhadap pencapaian akademik yang terstandarisasi membuat sekolah terjebak dalam orientasi hasil. Sekolah cenderung mengejar nilai dan data untuk memenuhi indikator keberhasilan, sehingga aspek pembentukan karakter dan pembinaan mental siswa kurang mendapatkan perhatian (Collins et al., 2021). Padahal, pendidikan sejati seharusnya memanusiakan manusia, bukan memproduksi data.

Jika kondisi ini terus berlangsung, penerapan kurikulum baru dikhawatirkan hanya akan mencetak siswa yang kompeten secara administratif tetapi miskin karakter dan kepekaan sosial. Tanpa reformasi sistem administrasi dan pelatihan guru yang memadai, tujuan kurikulum untuk membentuk pelajar yang beradab dan berdaya saing hanya akan menjadi retorika semata.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis atas problematika penerapan perubahan kurikulum, dapat disimpulkan bahwa hambatan terbesar bukan berasal dari tujuan pemerintah untuk memajukan pendidikan, melainkan dari strategi implementasinya yang kurang membumi. Kurikulum yang disusun dengan standar global dan sentralisasi digital sering kali tidak selaras dengan realitas ketimpangan infrastruktur serta kesiapan budaya belajar di berbagai daerah. Ketika kebijakan diterapkan secara seragam tanpa melihat kondisi faktual di tiap satuan pendidikan, yang muncul hanyalah kesan maju di permukaan, sementara guru dan siswa di lapangan menghadapi kebingungan, tekanan, dan ketidaksiapan yang nyata. Pendidikan pada akhirnya tidak bisa dipaksa bergerak lebih cepat dari fondasi sosial dan infrastruktur yang menopangnya.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih humanis dalam penyusunan dan penerapan kurikulum. Pemerintah hendaknya lebih mendengarkan suara para pelaku pendidikan di lapangan dan menempatkan pemerataan fasilitas serta peningkatan kompetensi guru sebagai prioritas sebelum menuntut digitalisasi maupun kemandirian siswa. Kurikulum yang efektif bukan sekadar yang canggih atau modern, tetapi yang mampu memeluk keberagaman konteks, memberikan ruang tumbuh yang adil bagi semua anak, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus kembali menjadi ruang untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar arena pencapaian angka dan pelaporan administratif.

## REFERENSI

- 24/Menkes/2022, P. R. N. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21 di SD/MI. *Internasional Conference on Islamic Education*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Abdullah, A. (2013). Madrasah Di Indonesia Dari Masa. *Paramita*, 23(2), 193–207.
- Angga, & Suryana, C. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *JURNAL BASICEDU*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>
- Aristiyanto, R. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia Pada Era Modern. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 3(2), 101–108. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3i2.2605>
- Budiman, Y. K., Muazza, M., Rahman, K. ., & Mailina, W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Paud Sekolah Penggerak TK Khalifah Kota Jambi. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.22437/jtpd.v2i1.26568>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Prinsip Pembelajaran Kurikulum Merdeka (Tinjauan Holistik Paradigma Ki Hajar Dewantara Sebagai Pendekatan). *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 167–186.

- Fatimah, M., Fatoni, M. H., Santoso, B., & Syarifuddin, H. (2024). School Administration: The Key to Success in Modern Educational Management. *Journal of Loomingulus Ja Innovatsioon*, 1(3), 141–149. <https://doi.org/10.70177/innovatsioon.v1i3.1422>
- Fatoni, M. H., Santoso, B., Syarifuddin, H., & Hanani, H. (2024). Models and Implementation of Curriculum Development in Schools. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 280–292. <https://doi.org/10.62504/jimr577>
- Fatoni, M. H., & Sukari. (2024). ARAH MASA DEPAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DI ERA SOCIETY 5.0. *AT TANBIH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 36–54. Retrieved from <https://ejournal.staimmgt.ac.id/index.php/tanbih/article/view/atanbihvol1no220244>
- Hadiapurwa, A., Riani, P., Yulianti, M. F., & KurniaYuningsih, E. (2021). Implementasi Merdeka Belajar untuk Membekali Kompetensi Generasi Muda dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 4(1), 115–129. <https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.3140>
- Halimah, Si. (2019). Relevansi Kurikulum Pendidikan Islam Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Di Era Millenial. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(1), 142–162.
- Journal, D., Education, O., Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). *Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka :(Independent Campus Learning Curriculum:)*. 8(1), 185–201.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*, 2(1), 41–57.
- Lestari, M. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Tinjauan Kritis dari Perspektif Guru. *Pernik*, 7(1), 43–51. <https://doi.org/10.31851/pernik.v7i1.15582>
- Rahayu, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *JURNAL BASICEDU*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

---

**Copyright Holder :**

© Yasin et.al (2025).

**First Publication Right :**

© Edulogia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman

**This article is under:**

